



RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
TAHUN 2024**



Jalan Darmodiharjo No. 03 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang



(0260) – 411015



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2025.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2025 ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, rencana kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis DPMD Tahun 2024-2026, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025, dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

Demikian semoga dengan penuh harapan Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan memberikan kontribusi dalam rangka mendukung tugas-tugas penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Subang.

Subang, 02 Mei 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUBANG



DADAN DWIYANA, AP, M.Si
NIP 19761021199603 1 00



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-4

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Subang Tahun 2023	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD ...	II-14
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RPD Tahun 2025.....	II-17
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-35

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMD Kabupaten Subang	III-4
3.3. Program dan Kegiatan	III-4

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana kerja dan Pendanaan DPMD	IV-1
---	------

BAB V PENUTUP

V-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Subang dan Pencapaian Renstra DPMD Kabupaten Subang Tahun 2023.....	II-2
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Subang.....	II-16
Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Subang Tahun 2025	II-21
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 Serta Perkiraan Maju Tahun 2026	III-6
Tabel 4.1 Matriks Cascading Pemetaan Nomenklatur Pemutakhiran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-2

LAMPIRAN – LAMPIRAN :

1. SK Tim Penyusun Renja Tahun 2025;
2. Surat Ketetapan Renja Tahun 2025,

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan beberapa aturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah, RPJM Nasional, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 maka Pemerintah Kabupaten Subang menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 yang menjadi acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah. Demikian halnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, sebagai Organisasi Perangkat Daerah wajib menjabarkan atas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas.

Disamping itu pula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, dituntut untuk membuat Rencana Kerja Tahunan sebagai pertanggungjawaban Rencana Strategis Dinas, sehingga bisa diaplikasikan.

Rencana kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang yang Berpedoman pada RPJPD Kabupaten subang dan Mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat.

Rencana kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa berisikan kegiatan-kegiatan usulan dari Masyarakat yang salah satunya dalam Musrembang Desa, Musrembang tingkat kecamatan sampai dengan Tingkat Kabupaten dimana diharapkan usulan – usulan tersebut dapat masuk dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Subang.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa senantiasa mendasarkan diri pada Visi, Misi dan Strategi Daerah yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka diperlukan suatu program yang memuat operasionalisasi kegiatan secara utuh dan menyeluruh yang terangkum dalam panduan Rencana Kerja OPD. Mengingat panduan rencana kerja OPD yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja DPMD Kabupaten Subang Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran negara nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonomi baru (DOB);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Tugas pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
 23. Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;
 24. Surat Edaran Bupati Subang Nomor : PM.01/558/BP4D Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
 25. Keputusan Kepala Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Nomor: PR.10.06/Kep.44/Sekret Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPMD pada Tahun 2025 sebagai upaya dalam pencapaian *Visi* dan *Misi* Daerah Kabupaten Subang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Nomor PR.10.06/Kep.44/Sekret tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja DPMD Kabupaten Subang ini adalah untuk memberikan pedoman atau acuan bagi aparatur DPMD (Sekretaris, Para Kepala Bidang, Subag dan Jabatan Fungsional di Lingkup DPMD) agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2025 sesuai dengan *Rencana Strategi* yang telah ditetapkan oleh Kepala DPMD Kabupaten Subang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja DPMD Kabupaten Subang Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran-gambaran umum dalam penyusunan Renja DPMD agar substansi yang dibahas pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Dalam Bab Pendahuluan ini terdiri atas beberapa sub bab meliputi:

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja DPMD Kabupaten Subang Tahun 2025

1.2 Landasan Hukum

Menjelaskan tentang Landasan Hukum penyusunan Renja DPMD Kabupaten Subang.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja DPMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DPMD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DPMD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Subang Tahun 2022 dan Capaian Renstra DPMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja DPMD Tahun 2022

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPMD Kabupaten Subang

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi DPMD Kabupaten Subang Tahun 2022

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Subang

Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPMD Kabupaten Subang

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Menjelaskan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 ke dalam Renja DPMD Kabupaten Subang Tahun 2025

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menjelaskan hasil penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2024 ke dalam Renja DPMD Tahun 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DPMD KABUPATEN SUBANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional ke dalam Renja DPMD Tahun 2024.

3.2 Tujuan dan Sasaran DPMD Kabupaten Subang

Menjelaskan tujuan dan sasaran dalam Renja DPMD

3.3 Program Kegiatan dan sub kegiatan

Memuat Program Kegiatan dan sub kegiatan dalam renja DPMD tahun 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DPMD KABUPATEN SUBANG

Memuat program kegiatan dan sub kegiatan DPMD tahun 2024 beserta pagu indikatif tahun 2025

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja DPMD Tahun 2025

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DPMD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Subang Tahun 2023.

Pelaksanaan Renja DPMD Kabupaten Subang Tahun 2023 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tetap dalam koridor tugas dan fungsi yang ditetapkan. Renja DPMD Kabupaten Subang Tahun 2023 merencanakan 5 program, 11 kegiatan 41 sub kegiatan. Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja DPMD kabupaten Subang tahun 2023 dan capaian Renstra DPMD Kabupaten Subang Tahun 2018-2023 pada target 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel T-C. 29/Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Daerah sampai dengan Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2023)			Target program dan kegiatan (Renja perangkat daerah tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
					Target	Realiasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	$8=(7/6)*100$	9	10	$11=(10/4)*100$
	Program Penataan Desa	Persentase penataan Desa	55		65	65	100%	50		
	Penyenggaraan Penataan Desa	Jumlah jenis kegiatan	3		1	1	100%	3		
	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan wilayahnya	40					40		
	Fasilitasi Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	40					40		
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	50		120	120	100%	50		
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Jumlah Kerjasama antar Desa	1		2	2	100%	1		



	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah jenis kegiatan	2		2	2	100%	1		
	Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1					1		
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	1		2	2	100%	1		
	Program Administrasi Pemerintahan desa	Persentase Desa dengan administrasi pemerintahan berkualitas baik	55		68	68	100%	50		
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah jenis kegiatan	10		7	7	100%	10		
	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1		1	1	100%	1		
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	1		0	0		1		
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	245		1	1	100%	245		
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	245		245	245	100%	245		
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1		1	1	100%	1		
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1		0	0		1		



			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelengkapan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelengkapan Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2	1	1	100%	2		
			Peningkatan Kapasitas Kelengkapan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (RU/RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan Kapasitasnya	85	85	85	100%	85		
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	1	1	100%	1		
			Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	1	100%	1		
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	1	100%	1		
			Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1	1	1	100%	1		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	100	100	100	100%	100		



	Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan	7	7	7	100%	7		
	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	100%	2		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	1	100%	1		
	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	1	100%	1		
	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	1	100%	1		
	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	1	100%	1		
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	3	100%	3		
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	3	3	3	100%	3		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis Kegiatan	3	3	3	100%	3		



	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40		37	37	100%	40		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1		1	1	100%	1		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1		1	1	100%	1		
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Kegiatan	3		1	1	100%	3		
	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1					1		
	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1		0	0		1		
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2		2	2	100%	2		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis Kegiatan	2		1	1	100%	2		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta Atribut kelengkapan	40		1	1	100%	40		
	Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	1					1		



RENSJA DPMD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025



	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	4		66	66	100%	4		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /Dirchabilitasi	4		1	1	100%	4		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas yang memegang peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Subang karena melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Bantuan Keuangan kepada Masyarakat secara Langsung Seperti :

1.

BKU Desa;
2.

ADD (Alokasi Dana Desa);
3.

DD (Dana Desa);
4.

Banprov (Infrastruktur dan Kinerja);
5.

Bantuan Desa;
6.

Bagi Hasil Pajak.

Semua bantuan Keuangan tersebut leading sektornya ada pada DPM, urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, secara fungsi sangat besar, yang perlu penanganan khusus, sebab dalam pengelolaan Bantuan Keuangan terutama di Desa sangat rawan sekali dalam penggunaannya.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada intervensi Pemberdayaan Masyarakat yang sangat berat yaitu urusan pemerintahan desa, yang mana kalau di tingkat propinsi DPM, Di tingkat Pusat Dirjen PMD.

Dengan 253 desa dan kelurahan yang harus dibangun, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang masih menghadapi tantangan operasional karena jumlah staf yang tidak memadai (37 orang). Selain itu, sumber daya manusianya perlu ditingkatkan karena banyak pegawai baru yang belum belajar tentang Peraturan-peraturan Tentang Pemerintahan Desa.

Upaya yang telah dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa :

- a. Melakukan advokasi pada Pimpinan tentang kondisi Lembaga dan mengajukan pada BKSDM Kabupaten Subang untuk penambahan pegawai Pada DPM.
- b. Meningkatkan Koordinasi dengan lembaga terkait tentang penanganan urusan bersama dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat terutama, masalah urusan Pemerintahan Desa.



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Subang

NO	Indikator IKU	Angka Target/Standar Nasional	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	Tahun 2022 (thn n-2)	Tahun 2023 (thn n-1)	Tahun 2024 (thn n)	Tahun 2025 (thn n+1)	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
1	Presentase aparatur desa yang telah mengikuti pelatihan		14,7	-			14,7				
2	Presentase penetapan RPJMDes		23,6	-			23,6				
3	Jumlah BUMDes Jawa		10	10			17	10			
4	Indeks Desa Membangun (IDM)		0,7251	0,7263			0,752	0,7841			
5	Presentase kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)		70	90			83,7	90			
6	Nilai AKIP		BB (76,01)	BB (76,01)			BB (72,25)	BB (74,20)			



7	Indeks Kepuasan Masyarakat		B (84,29)	B (85,26)			B (88,29)	B (84,28)				
1	Indeks Desa Membangun				0,7521	0,7522						
2	Persentase Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Aparatur Desa				15	25						
3	Persentase fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset desa				15	25						
4	Peningkatan kinerja BUMDes				6	7						
5	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)				25	30						
6	Nilai Evaluasi AKIP				B (67,65)	B (67,85)						
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				B (76,80)	B (77,00)						

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah Kabupaten Subang dan Peraturan Bupati Subang Nomor 74 tahun 2019 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Diimpin Oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. DPMD memiliki tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud DPMD menyelenggarakan Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati;
3. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan dan barang daerah.

1). Isu-Isu Penting Berdasarkan Tupoksi DPMD

- Isu-isu penting yang dapat berpengaruh pada program dan kegiatan dan perlu mendapat perhatian sehingga diharapkan lahir keadaan yang lebih baik diantaranya yaitu:
1. Peningkatan Sumber daya manusia (SDM) diberbagai tingkat baik ditingkat kabupaten, kecamatan dan terutama desa dalam mengelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.
 2. Pengoptimalan sumber daya alam (SDA) dalam menumbuhkan kembangan



potensi-potensi unggulan yang akan berpengaruh pada pengembangan perekonomian kawasan perdesaan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPMD menghadapi beberapa permasalahan yang dapat dikategorikan sebagai kelemahan (weaknees) apabila tidak ditangani segera secara insentif, diantaranya nyaitu:

1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM pengelola pemberdayaan masyarakat dan desa baik di tingkat Kabupaten, kecamatan dan Desa;
2. Penataan desa yang masih diperlukan penyesuaian dan pembaharuan secara aimultan berkaitan dengan tingkat perkembangan desa sesuai pasal 11 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa sehingga desa dapat melaksanakan kewenangannya secara lebih baik lagi;
3. Kontribusi pemerintahan desa terhadap upaya peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat desa masih minim dengan kecilnya alokasi anggaran pada APBDes untuk BUMDes serta sarana prasarana ekonomi desa yang belum terkelola dengan baik;
4. Pemuktahiran dan Sinergitas data yang berkaitan dengan Aset desa dan potensi desa;
5. Sinergitas program / kegiatan pemerintah pusat & Provinsi.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap Pencapaian Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(3)	(4)	(5)
1	1. Jumlah sumber daya manusia di DPMD yang masih terbatas; 2. Belum optimalnya basis data yang terpadu, sehingga data yang dihasilkan beragam dan	1.Sumber daya manusia yang masih kurang dan belum optimal. 2.Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung belum optimal; 3.Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak	1.Adanya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia; 2.Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, pengolahan data dan informasi berbasis
2	1. Belum terpenuhinya kebutuhan infrstruktu desa 2. Belum berkembangnya pembangunan berbasis kawasan perdesaan (produk unggulan desa dan produk unggulan	1. Infrastruktur desa belum merata 2. Pembangunan berbasis kawasan pedesaan belum berkembang 3. Teknologi Tepat Guna pedesaan belum merata	1. Pembangunan infrastruktur dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan penanganan pengentasan

2). Dampak terhadap Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah

Isu penting dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dapat memberikan dampak terhadap pencapaian Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah serta sinergitas pembangunan ditingkat Pemerintah pusat dan Provinsi diantaranya yaitu :

1. Ketepatan dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan proses pembangunan di desa akan mengalami hambatan dalam beberapa aspek;
3. Pengembangan perekonomian desa belum dapat tepat waktu dan sasaran;
4. Belum lengkapnya data mengenai Desa yang akan berpengaruh pada tahapan-tahapan proses pembangunan.

3). Tantangan dan Peluang dalam peningkatan pelayanan

Peluang meningkatkan pelayanan perangkat daerah antarlain yaitu :

1. Perkembangan teknologi informasi dapat dimanfaatkan guna pengoptimalisasi pelaksanaan koordinasi, konsultasi, pendokumentasian dan penyebaran informasi sehingga penyelenggaraan proses pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien;
2. Peraturan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan terutama bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa;
3. Meningkatnya perhatian dan koordinasi dari berbagai pihak mulai dari desa, antar perangkat daerah tingkat kabupaten, pemerintah provinsi dan pusat serta pihak ketiga lainnya.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RPD Tahun 2025

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsi menjalankan dua Tujuan yaitu :

1. “Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”

2. “Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan.

1. Ikut menciptakan pemerintahan yang bersih serta peningkatan kualitas pelayanan public pada masyarakat, meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, meningkatkan pelayanan publik
2. Ikut membangun infrastruktur dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan ekonomi kemasyarakatan dan penanganan pengentasan kemiskinan termasuk juga pemberdayaan apatur pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan.

Rata-rata skor selanjutnya ikut menentukan program/kegiatan strategis Dispemdes Kabupaten Subang yang akan dilaksanakan untuk menangani berbagai permasalahan yang ada.

Analisa Kekuatan

Berdasarkan hasil analisa terhadap potensi/sumber daya, kekuatan yang mungkin timbul, maka strategis yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan melalui analisa strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, meliputi:

- ❖ Mendayagunakan seluruh potensi/sumber daya manusia Aparat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan dan memanfaatkan jalinan kerjasama, koordinasi dan keterpaduan program dengan semua stakeholder yang di Kabupaten Subang dalam pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- ❖ Mendayagunakan sarana dan prasarana kerja untuk meningkatkan kinerja aparat/pegawai Dispemdes
- ❖ Merumuskan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk mendayagunakan, Kepala Desa/Kelurahan, Pengurus, LPM, BPD dan Pengurus LPMD, kader serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- ❖ Mengusulkan dukungan dana/anggaran kepada Pimpinan Daerah untuk meningkatkan operasional pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dispemdes Kabupaten Subang, khususnya untuk mendukung penegakan mekanisme operasional program dan Kegiatan.

Analisa Kelemahan

Hasil analisa meminimalkan kelemahan, meliputi:

- ❖ Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia/aparatur Dispemdes dengan mengikut sertakan dalam Diklat Teknis Fungsional.
- ❖ Meningkatkan jaringan sistem informasi dengan Dinas/Lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Kabupaten Subang baik secara manual maupun elektronik.
- ❖ Menggalang kerjasama partisipasi seluruh stakeholder dan customer melalui musyawarah mufakat atau rapat-rapat koordinasi dan rapat konsultasi.
- ❖ Mendayagunakan saran dan prasarana kerja yang tersedia melalui pemanfaatan secara efektif dan efisien.
- ❖ Memanfaatkan dukungan yang ada untuk menunjang pemenuhan kebutuhan IT dalam penyediaan data, dan informasi yang akurat, dinamis dan cepat.

Analisa Peluang

- ❖ Meningkatkan intensitas sistem informasi dan kerjasama yang terintegrasi dengan semua stakeholder baik dalam bentuk kegiatan formal maupun informal.
- ❖ Meningkatkan fungsi sub koordinasi dalam memanfaatkan kinerja individu, kinerja proses dan kinerja organisasi.
- ❖ Meningkatkan efektivitas kerja dalam memanfaatkan sarana dan prasarana kerja.

Analisa Ancaman

- ❖ Melaksanakan Bintek-bintek khusus melalui para stakeholder Perangkat Desa/Kelurahan tentang pemahaman program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- ❖ Melaksanakan koordinasi lintas sektoral untuk mengatasi kurangnya kemampuan Aparat Kecamatan, Aparat Desa/Kelurahan, Pengurus BPD, Pengurus LPM dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- ❖ Merevisi peraturan-peraturan daerah dan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang dinilai tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat serta tuntutan aspirasi masyarakat yang makin beragam.



Review terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Subang Tahun 2024 merupakan proses membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan Renja DPMD Kabupaten Subang Tahun 2025 dengan menetapkan prioritas program kegiatan sebagai berikut :



Tabel T-C. 31/ Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RPD Kabupaten Subang Tahun 2025

RENCANA AWAL RPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)						
3	4	8	9	10	11	12	13		
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			14.422.421.582,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			14.422.421.582,00		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.422.421.582,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			14.422.421.582,00		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			14.422.421.582,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			14.422.421.582,00		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah Kab/Kota	100 Persen	7.245.868.082,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah Kab/Kota	100 Persen	7.245.868.082,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	7 Jenis	72.695.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	7 Jenis	72.695.000,00		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					



	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.500.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.237.500,00		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.237.500,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.509.500,00		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	5.509.500,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD				Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD			
	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.175.000,00		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.175.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.925.000,00		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	5.925.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			



	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.125.000,00		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	4.125.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	39.223.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	39.223.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	3 Jenis	5.757.427.982,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	3 Jenis	5.757.427.982,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.744.427.982,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 Orang/bulan	5.744.427.982,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.500.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD			



	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.500.000,00		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.500.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	3 Jenis	16.045.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	3 Jenis	16.045.000,00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.500.000,00
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.045.000,00		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	9.045.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.500.000,00		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	5.500.000,00



Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	2 Jenis	32.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	2 Jenis	32.000.000,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	30.000.000,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	30.000.000,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000,00		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Jumlah jenis kegiatan	8 Jenis	801.578.500,00		Jumlah jenis kegiatan	8 Jenis	801.578.500,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.600.000,00		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.600.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	130.520.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	130.520.000,00



Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	15.730.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
					1 Paket
					15.730.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	252.000.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
					1 Paket
					252.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	37.250.000,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
					2 Paket
					37.250.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	10.800.000,00		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
					3 Dokumen
					10.800.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu				Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	45.475.000,00		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
					1 Laporan
					45.475.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343 Laporan	291.203.500,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343 Laporan	291.203.500,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan	1 Jenis	45.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan	1 Jenis	45.000.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	45.000.000,00		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	45.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan	2 Jenis	266.982.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan	2 Jenis	266.982.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	70.734.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	70.734.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	196.248.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	196.248.000,00



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan	4 Jenis	254.139.600,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis kegiatan	4 Jenis	254.139.600,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	77.900.000,00		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	77.900.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	41.400.000,00		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	41.400.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	37.200.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	37.200.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			



	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/Direhabilitasi	2 Unit	97.639.600,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeelihara/Direhabilitasi	2 Unit	97.639.600,00
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan desa	50 Persen	50.000.000,00	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan desa	50 Persen	50.000.000,00
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah jenis kegiatan	2 Jenis	50.000.000,00	Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah jenis kegiatan	2 Jenis	50.000.000,00
Fasilitasi Tata Wilayah Desa				Fasilitasi Tata Wilayah Desa			
	Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya	40 Desa	25.000.000,00		Jumlah Desa yang Terasilitasi Penataan Wilayahnya	40 Desa	25.000.000,00
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	50 Unit	25.000.000,00		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	50 Unit	25.000.000,00
PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	1 Jumlah	67.047.500,00	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	1 Jumlah	67.047.500,00
Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah jenis kegiatan	2 Jenis	67.047.500,00	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah jenis kegiatan	2 Jenis	67.047.500,00
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota				Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota			



	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.000.000,00		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	35.000.000,00
Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan			
	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	32.047.500,00		Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	32.047.500,00
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan berkualitas baik	50 Persen	6.094.807.000,00	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan berkualitas baik	50 Persen	6.094.807.000,00
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah jenis kegiatan	10 jenis	6.094.807.000,00	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah jenis kegiatan	10 jenis	6.094.807.000,00
Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				Facilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	200.875.000,00		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1 Dokumen	200.875.000,00
Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			
	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	25.100.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	1 Dokumen	25.100.000,00
Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				Facilitasi Pengelolaan Keuangan Desa			



	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	4.325.887.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	2 Dokumen	4.325.887.000,00
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			
	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	245 Orang	200.000.000,00		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	245 Orang	200.000.000,00
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	91.220.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen	91.220.000,00
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	165 Laporan	800.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	165 Laporan	800.000.000,00
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa				Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			
	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	245 Dokumen	3.500.000,00		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	245 Dokumen	3.500.000,00
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			



	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	200.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	200.000.000,00
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			
	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	245 Orang	200.000.000,00		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	245 Orang	200.000.000,00
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	48.225.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	48.225.000,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum ada yang berdasarkan adat	25 Persen	964.699.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum ada yang berdasarkan adat	25 Persen	964.699.000,00
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan	7 Jenis	964.699.000,00	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kegiatan	7 Jenis	964.699.000,00
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat			



	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	20.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	20.000.000,00
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	44.703.250,00		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	2 Dokumen	44.703.250,00
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	65 Lembaga	69.388.250,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	65 Lembaga	69.388.250,00



Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	44.331.500,00	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen	44.331.500,00
Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			
	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	46.276.000,00		Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	46.276.000,00
Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			
	Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	40.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Facilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	40.000.000,00
Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			
	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	700.000.000,00		Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	700.000.000,00
			14.422.421.582,00				14.422.421.582,00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam anggaran tahun 2025 terdapat usulan musrenbang tahun 2024 untuk Kegiatan belum dituangkan dalam beberapa Sub Kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, karena belum ada Pagu anggaran yang tersedia.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DPMD KABUPATEN SUBANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Visi Indonesia 2045 mewujudkan tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia yang lebih baik dan merata dengan kualitas manusia yang lebih tinggi, ekonomi Indonesia yang meningkat menjadi negara maju dan salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia, pemerataan yang berkeadilan di semua bidang.

Visi Presiden dan Wakil Presiden untuk dapat mencapai pembangunan Indonesia adalah: **"Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"** Visi tersebut dijabarkan dalam 9 (sembilan) Misi, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Selain upaya mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, terdapat 5 (lima) arahan Presiden dalam mewujudkan agenda pembangunan nasional, yaitu:

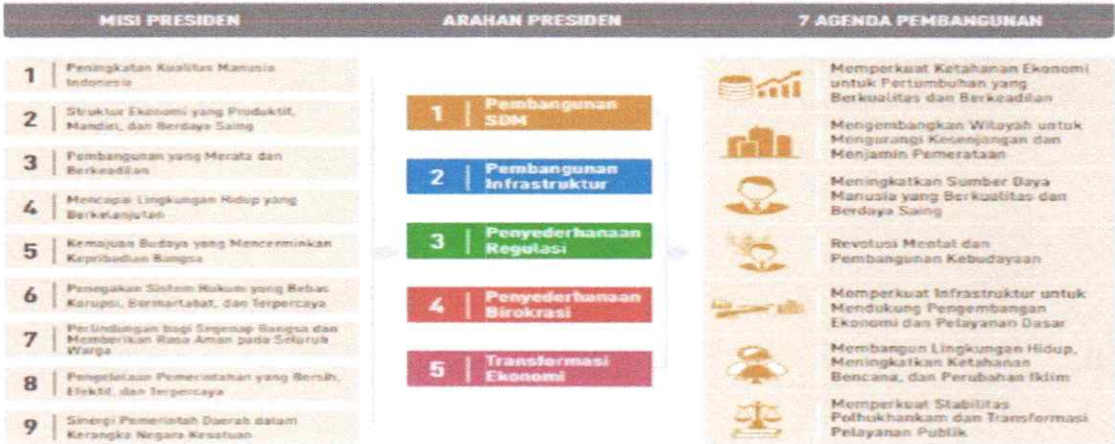
1. Pembangunan Sumberdaya Manusia (SDM)
 2. Pembangunan infrastruktur
- Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
- Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata, mendorong praklapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan regulasi
- Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang. Pertama UU Cipta Lapangan Kerja, dan Kedua UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan birokrasi
- Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur, dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi ekonomi
- Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya VISI-MISI dan ARAHAN STRATEGIS tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. 7 Agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020 – 2024, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
3. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
4. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
5. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Hubungan keterkaitan antara Visi dan Misi Presiden, Arahannya Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional adalah:



Gambar. Hubungan Visi, Misi, Arahannya Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional

Selanjutnya Telaah program prioritas Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Tugas tersebut, secara spesifik merupakan instrumen untuk melaksanakan misi ketiga Presiden dan Wakil Presiden yaitu Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas Nasional ke-2 yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga, visi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi pada kurun waktu 2020-2024 adalah: ***"Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong"***.

Pengertian dari visi tersebut adalah:

- a. Perdesaan adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan Kawasan transmigrasi baik di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- b. Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan daya saing.
- c. Berkelanjutan adalah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi dan daerah tertinggal yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi yang sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
- d. Keunggulan Daya Saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional.
- e. Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong: merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Visi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi ***"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"*** Untuk mewujudkan Visi, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi mempunyai misi yang mencakup (7) tujuh kegiatan, yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia sebagai Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dalam kebudayaan

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Renstra DPMD Kabupaten Subang Tahun 2024-2026 tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Terwujudnya akuntabilitas dan kinerja pelayanan.

Adapun sasaran jangka menengah yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan;
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMD.

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan pencapaian Tujuan dan Sasaran kabupaten Subang tersebut, maka Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dicapai.

Program adalah merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan partisipasi masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.



Dalam Renja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa Kabupaten Subang tahun 2025 terdapat 5 program, 12 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan jumlah pagu indikatif Rp.13.211.084.156,- (Didalamnya sudah termasuk Hasil Musrenbang Tahun 2024 dari Kecamatan Cisalak untuk BUMDes 2 Desa) Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Subang kecuali untuk kegiatan rapat koordinasi dan bimbingan teknis ada yang dilaksanakan di luar daerah. Dari total pagu indikatif tersebut, seluruhnya bersumber dari Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum / Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Subang Tahun 2025.



Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Perangkat Daerah Tahun 2025 serta Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Subang
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				
				Rencana Tahun 2025		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
				Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	Target Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif (Rp)	
				8	9			
4	5	6	7					
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan desa	Persen	50	55	212.977.447	60	218.301.883	
Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	3	3	212.977.447	3	218.301.883	
Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan wilayahnya	Desa	40	40	27.594.666	40	28.284.532	
Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	40	40	27.789.031	40	28.483.757	
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	50	50	157.593.750	50	161.533.594	
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama antar desa	Jumlah MoU	1	1	58.284.532	1	63.991.646	
Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	2	2	58.284.532	2	63.991.646	



Fasilitasi Kerja sama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	28.284.532	1	28.991.646
Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Dokumen	1	1	1	30.000.000	1	35.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum ada yang diberdayakan	Persen	25	30	35	1.980.382.829	35	2.034.017.400
Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat melakukannya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	7	7	7	1.980.382.829	7	2.034.017.400
Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum	Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat	Dokumen	1	1	1	35.000.000	1	40.000.000
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karangruna), Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	2	2	2	71.478.346	2	73.265.305
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (Rt/Rw,PKK,Posyandu,LPM,dan karang taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang dtingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	85	85	75	739.930.741	75	758.429.009



Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1	37.691.172	1	38.633.451
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1	68.105.255	1	69.807.887
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan gerakan pemberdayaan Masyarakat dan kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1	771.927.315	1	791.225.498
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1	256.250.000	1	262.656.250
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan berkualitas baik	Persen	50	55	1.802.586.730	60	1.847.651.398
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	10	10	1.802.586.730	10	1.847.651.398
Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	1	1	32.910.828	1	33.733.599
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	1	1	59.018.859	1	60.494.331
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	245	245	315.627.712	245	323.518.405



Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	245	245	529.675.220	245	542.917.101
Penyelenggaraan Pemilihan, Peningkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan hasil Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	1	1	140.641.916	1	144.157.964
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	1	1	3.488.075	1	3.575.277
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	1	1	15.019.210	1	15.394.690
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	85	85	139.126.389	75	142.604.549
Fasilitasi Evaluasi perkembangan desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	1	1	30.888.375	1	31.660.584
Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	1	1	536.190.146	1	549.594.900
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah Kab/Kota	Persen	100	100	7.722.305.850	100	7.920.363.496
Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	7	7	94.370.618	7	96.729.883
Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	9.261.259	2	9.492.791
Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	6.383.269	1	6.542.851



Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.572.909	1	5.712.232
Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.572.909	1	5.712.232
Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.572.909	1	5.712.232
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	56.412.915	3	57.823.238
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	3	3	5.594.447	3	5.734.308
Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	3	3	5.898.240.072	3	6.045.696.073
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/ Bulan	40	40	5.886.986.565	40	6.034.161.229
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.892.100	1	7.064.403
Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /Semesteran SKPD	Laporan	1	1	4.361.407	1	4.470.442



Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	3	3	3	17.388.013	3	18.260.213
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	2.500.000	1	3.000.000
Pengamanan Barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	9.692.016	1	9.934.316
Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	2	5.195.997	2	5.325.897
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	2	2	2	34.806.719	2	36.114.387
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah paket Pakaian dinas beserta Atribut kelengkapan	Paket	40	40	40	32.306.719	40	33.114.387
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Dokumen	1	1	1	2.500.000	1	3.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	8	8	8	1.053.316.396	8	1.079.649.306
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	8.615.125	1	8.830.503
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	98.978.617	1	101.453.082
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	21.535.120	1	22.073.498



Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	316.535.846	1	324.449.242
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	16.153.359	1	16.557.193
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	11.630.419	3	11.921.179
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	41.460.289	1	42.496.796
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	343	343	538.407.621	343	551.867.812
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	2	2	156.889.573	2	164.936.812
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4	4	121.889.573	4	124.936.812
Pengadaan Meubel	Jumlah paket Meubel yang disediakan	Unit	3	3	35.000.000	3	40.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	2	2	275.688.695	2	282.580.913
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	4	84.082.931	4	86.185.004
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	14	14	191.605.764	14	196.395.909



Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	4	4	4	191.605.764	4	196.395.909
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	21	21	21	65.582.639	21	67.222.205
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	18	18	18	38.121.928	18	39.074.976
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang Dipelihara	Unit	4	4	4	22.614.703	4	23.180.071
Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	4	4	65.286.494	4	66.918.656



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUBANG

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2025 adalah turunan dari Rencana Strategis 2024-2026. Adapun rencana kerja dan pendanaan DPMD Kabupaten Subang Tahun 2025 tertuang dalam Cascading Kinerja Renja Tahun 2025-2026 (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023) atau Tabel. 4.1 yang tertuang dalam PPAS Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel. 4.1
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA TAHUN 2025

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01.00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran (Rp.)			
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan					
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					13.211.084.156		
2	13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.467.448.656		
2	13	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH							
2	13	1	201	Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					39.697.000		
2	13	01	2.01	Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	6.500.000
2	13	01	2.01	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	6.237.500
2	13	01	2.01	Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	5.509.500
2	13	01	2.01	Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	5.175.000
2	13	01	2.01	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	5.925.000
2	13	01	2.01	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	5.175.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran (Rp.)	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	18.225.000
2	13	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	118.177.300
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 paket	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	15.355.000
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	165.500.000
2	13	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	40.372.750
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	3 Dokumen	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	10.800.000
2	13	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	45.475.000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165 laporan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	235.700.000
2	13	1	2.07		Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah								45.000.000
2	13	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yg disediakan	5 unit	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	45.000.000
2	13	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah								305.646.000
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	70.734.000

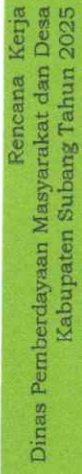
Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan				Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran (Rp.)	
					Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan	Target			
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	1 Laporan	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	234.912.000
2	13	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah								196.900.000
2	13	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 Unit	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	77.900.000
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak dan perijinan kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perijinannya	18 Unit	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	41.400.000
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah Peralatan dan mesin yang dipelihara	2 unit	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	27.600.000
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah kab/kota	B (67,65)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	Nilai Evaluasi AKIP	BB (74,50)	Kab. Subang	50.000.000
2	13	2			PROGRAM PENATAAN DESA								212.977.000
2	13	2	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa								212.977.000
2	13	02	2.01		Fasilitasi tata wilayah Desa	Persentase Penataan Desa	B (67,65)	Jumlah desa yang terfasilitasi tata wilayah Desa	40 Desa	Indeks Desa Membangun	0,7844	Kab. Subang	212.977.000
2	13	3			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA								43.122.500
2	13	3	2.01		Fasilitasi Kerja sama antar Desa								43.122.500
2	13	03	2.01	01	Fasilitasi Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama Desa	1 MoU	Jumlah Dokumen Kerja sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	2 Dokumen	Indeks Desa Membangun	1 MoU	Kab. Subang	23.835.000
2	13	03	2.01		Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah kerjasama Desa	1 MoU	Jumlah dokumen hasil Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	1 Dokumen	Indeks Desa Membangun	1 MoU	Kab. Subang	19.287.500
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								4.145.395.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			Lokasi Kegiatan	Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran (Rp.)				
		Indikator Kinerja	Target	Output Kegiatan	Target	Outcome Kegiatan						
2	13	05	2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.342.141.000			
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang di berdayakan	1 Dokumen	Jumlah dokumen hasil Identifikasi dan infentarisasi masyarakat hukum adat	1 Dokumen	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	30%	Kab. Subang	25.000.000	
2	13	05	2.01	02	Fasilitasi Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (Rt/Rw,PKK,Posyandu,LPM,dan karang taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Penataan pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (Rt/Rw,PKK,Posyandu,LPM,dan karang taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	1 Dokumen	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	30%	Kab. Subang	224.120.000
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (Rt/Rw,PKK,Posyandu,LPM,dan karang taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat	85 Lembaga	Jumlah lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan (Rt/Rw,PKK,Posyandu,LPM,dan karang taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan masyarakat hukum adat yang meningkatkan Kapasitasnya	2 Lembaga	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	30%	Kab. Subang	75.000.000
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	1 Dokumen	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	30%	Kab. Subang	30.000.000
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	Persentase Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	30%	Kab. Subang	35.566.000



CASCADING RENJA TAHUN 2025-2026 (Sesuai Kepmendagri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023)

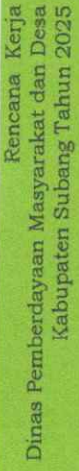
TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	SASARAN	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN dan SUB KEGIATAN	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2024	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
							2025		2026	
							Target	Rp	Target	Rp
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan							
				Indeks Desa Membangun	Skor	0,7521	0,7844	0,7845		
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Penataan desa	Persen	50	55	212.977.447	60	218.301.883

RENJA DPMD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025



					Jumlah lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan masyarakat hukum ada yang diberdayakan	Persen	25	30	1.980.382.829	35	2.034.017.400
					Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis kegiatan	7	7	1.980.382.829	7	2.034.017.400
					Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum	Dokumen	1	1	35.000.000	1	40.000.000
					Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	2	2	71.478.346	2	73.265.305

RENJA DPMD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025



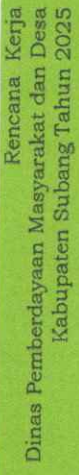
	Persentase meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa								
						BUMDes	6	7		8
						Persentase penyelenggaraan peningkatan kapasitas aparatur desa	15	25		30
						Persentase fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa	15	25		35
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa dengan administrasi pemerintahan berkualifikasi baik	50	55	1.802.586.730	60 1.847.651.398
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah jenis kegiatan	10	10	1.802.586.730	10 1.847.651.398
					Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1	1	32.910.828	1 33.733.599

RENJA DPMD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025



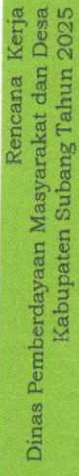
2	Mewujudkan Pelayanan dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai Evaluasi SAKIP	Meningkatnya kinerja pelayanan DPMD																
					Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (67,65)	B (74,50)	B (74,95)										
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	B (76,80)	B (85,30)	B (85,40)										
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH														
					Presentase terlaksananya urusan pemerintah daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100										7.920.363,496
					Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														96.729,883
					Jumlah jenis kegiatan	Jenis	7	7	7										
				Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	2										9.492.791
				Kordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1										6.542.851
				Kordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1										5.712.232

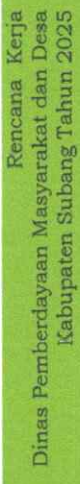
						Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.572.909	1	5.712.232
						Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	5.572.909	1	5.712.232
						Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	56.412.915	3	57.823.238
						Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	3	3	5.594.447	3	5.734.308
						Administrasi Keuangan perangkat daerah	Jumlah jenis kegiatan	Jenis	3	3	5.898.240.072	3	6.045.696.073
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	Orang/Bulan	40	40	5.886.986.565	40	6.034.161.229
						Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	6.892.100	1	7.064.403

RENJA DPMD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025



					Jumlah jenis kegiatan	Jenis	8	8	1.053.316.396	8	1.079.649.306
				Administrasi Umum Perangkat Daerah							
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	8.615.125	1	8.830.503
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	98.978.617	1	101.453.082
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	21.535.120	1	22.073.498
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	316.535.846	1	324.449.242
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	16.153.359	1	16.557.193
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	11.630.419	3	11.921.179
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	41.460.289	1	42.496.796

RENJA DPMD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

RENJA DPMD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

BAB V PENUTUP

Alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT bahwa Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 telah selesai disusun.

Dengan adanya Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025, maka semua program dan kegiatan serta sub kegiatan yang menjadi Tugas Pokok dan Fungsi DPMD Kabupaten Subang pada tahun anggaran 2025 sudah bisa tergambarkan untuk dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian juga Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan di Tahun 2024 yang sudah dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Subang, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Subang. Walaupun masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan di Tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja Tahun 2025 kami susun semoga Allah senantiasa meridhoi dan membimbing setiap langkah yang akan lakukan kearah yang benar sesuai petunjuk-Nya, Amiin.

Subang, 31 Mei 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUBANG



DADAN DWIYANA, AP, M.Si
NIP 19761021199603 1 003



LAMPIRAN-LAMPIRAN :



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Darmodiharjo No. 3 Telepon / Fax : (0260) 411015 Subang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 000.8.3.3/Kep.54 - Sekret
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025, perlu ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD sebagai Organisasi Perangkat Daerah ke dalam Rencana Strategis sesuai dengan tupoksinya;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Subang;
 - c. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Nomor : PR.10.06/Kep.44 - Sekret tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, perlu ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas;
 - d. bahwa berdasarkan Diktum c, maka perlu dibuat Ketetapan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dengan Keputusan Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Subang;
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas;
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;
12. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Nomor : 0008.3.3/Kep.64-Sekret Tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2025;
- KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Acuan dan Panduan Operasional Kerja Tahunan bagi setiap aparat DPMD;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUBANG



DADAN DWIYANA, AP, M.Si
NIP.19761021199603 1 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

Nomor : 000.8.3.3/Kep.54 - Sekret
Tanggal : 02 Mei 2024
Tentang : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Subang.

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

Penanggung Jawab : Kepala DPMD Kabupaten Subang;
Ketua Umum : Sekretaris DPMD
Ketua : Kabid Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi
Masyarakat;
Sekretaris : Perencana Ahli Muda
Anggota :
1. Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
2. Kabid Pemerintahan Desa;
3. Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi
Masyarakat;
4. Kasubag Keuangan dan Barang Daerah;
5. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
6. Jabatan Fungsional di Lingkup Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
7. Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUBANG



DADAN DWIYANA, AP, M.Si
NIP.19761021199603 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Darmodiharjo No. 3 Telepon / Fax : (0260) 411015 Subang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 0008.3.3/Kep. - 69 - Sekret

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

T E N T A N G

SURAT KETETAPAN RENCANA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025, perlu ditindaklanjuti secara teknis oleh OPD sebagai Organisasi Perangkat Daerah ke dalam Rencana Strategis sesuai dengan tupoksinya;
 - b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Subang;
 - c. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Nomor : PR.10.06/Kep.44 - Sekret tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026, perlu ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas;
 - d. bahwa berdasarkan Diktum c, maka perlu dibuat Ketetapan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang dengan Keputusan Kepala Desa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Bupati Subang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Subang;
10. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas;
11. Peraturan Bupati Subang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;
12. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Nomor : 0008.3.3 /Kep.64-Sekret Tanggal 30 April 2024 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang Tahun 2025;

KEDUA : Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Acuan dan Panduan Operasional Kerja Tahunan bagi setiap aparat DPMD;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Subang;
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal : 31 Mei 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SUBANG



DADAN DWIYANA, AP, M.Si
NIP. 19761021199603 1 003